



**KABUPATEN SELUMA**

**RABU, 08 JULI 2020**

**SUMBER BERITA**

|   |                   |  |                 |
|---|-------------------|--|-----------------|
|   | RAKYAT BENGKULU   |  | MEDIA INDONESIA |
| X | BENGKULU EKSPRESS |  | KOMPAS          |
|   | RADAR BENGKULU    |  | .....           |

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Bupati Sesalkan Seluma Dapat WDP**

**TAIS, BE** - Bupati Seluma H Bundra Jaya SH MH kembali menyesalkan karena sampai saat ini Kabupaten Seluma masih menerima predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Bahkan, sejak Kabupaten Seluma berdiri, belum pernah sekalipun Seluma menerima Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bengkulu.

Hal ini disampaikan oleh Bupati Seluma se usai menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD tahun 2019 lalu kepada DPRD Seluma. "Sejak Kabupaten Seluma berdiri sampai saat ini belum juga pernah menerima predikat WTP. Seharusnya bisa memperoleh WTP. Tapi karena lagi-lagi terkendala masalah aset. Sehingga audit BPK belum berhasil memperoleh predikat WTP," tegasnya.

Dijelaskan, aset yang dimiliki kembali menjadi kendala untuk memperoleh predikat WTP. Karena masih banyak aset yang belum berhasil didata, sehingga selalu menjadi penghambat untuk bisa memperoleh predikat WTP.

Bupati Seluma meminta juga kepada anggota DPRD Seluma juga untuk melaksanakan pengawasan dengan baik, serta menjalankan fungsi dalam hal pengawasan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Seluma.

"Kami juga meminta dukungan penuh dari DPRD Seluma untuk bisa mendukung dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Seluma, sehingga semua pembangunan bisa terlaksana dengan baik.

"Kami berharap DPRD Seluma serta masyarakat secara luas untuk bisa melaksanakan dan mendukung semua pembangunan di Kabupaten Seluma," tegasnya lagi.

Sementara itu sebelumnya dari hasil audit BPK tahun 2020 atas realisasi belanja tahun 2019 ada temuan sebesar Rp 1,041 miliar. Temuan ini di beberapa OPD, serta terbesar merupakan pada Dinas Pariwisata dan Pemuda Olah Raga (Disparpora), yakni sebesar Rp 400 juta. Bupati Seluma meminta agar dalam waktu 60 hari semua temuan sudah harus dikembalikan. (333)